

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Latar Belakang Kemenag

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode tahun 2005-2015 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan untuk Tahun 2015 Visi Indonesia adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2015-2019, telah ditetapkan 9 prioritas pembangunan nasional yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagaimana dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Kemudian ditegaskan lagi dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Per. Men PAN-RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviu atas LAKIP serta PMA No. 172 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Agama.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan maka seluruh instansi pemerintah menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga di capai tujuan yang obyektif, terukur, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat sasaran. Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi melalui penyusunan LAKIP.

UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka peranan LAKIP menjadi sangat strategis, sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2005. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*).

Kementerian agama ini lebih muda usianya dibandingkan dengan penetapan pemekaran dari kab.Bengkalis yaitu pada tanggal 19 Desember 2008 dengan dasar hukum berdirinya adalah undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

## **B. Visi Misi Kementerian Agama**

### **VISI**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti merumuskan visi sebagai berikut “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI YANG TAAT BERAGAMA, CERDAS,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUKUN, DAN HARMONIS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”.

**MISI**

Untuk merealisasikan visi tersebut ditetapkan lima misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang Taat Menjalankan Ajaran Agama.
2. Mewujudkan Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas dan Terkemuka.
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang Rukun dan Harmonis dalam Kehidupan Beragama.
4. Mewujudkan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Prima Kepada Masyarakat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Keperintahan yang Bersih dan Berwibawa.

**C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan PMA No. 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh seorang Kepala yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Bimas Islam.
3. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5. Penyelenggara Buddha



## Pejabat di Lingkungan Kemenag Kepulauan Meranti

